

# **Analisis Implementasi Prinsip GDPR pada Aplikasi Tiktok**



## **Kelompok 9**

**Disusun oleh :**

**Naufal Rizqy K.P      2211102114**

**M. Ardi Alfatih      2211102105**

**Willyan Hyuga      2211102129**

**Dito Prasetyo      2211102094**

**M. A. Faturrahman    2211102121**

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA**

**FAKULTAS INFORMATIKA**

**TELKOM UNIVERSITY**

**PURWOKERTO**

**2025**

# **Analisis Penerapan Prinsip GDPR oleh TikTok**

## **A. Pendahuluan**

Perkembangan teknologi digital mengubah cara individu berinteraksi dan berbagi informasi. Aplikasi seperti TikTok kini menjadi bagian dari keseharian, terutama bagi generasi muda. Meski populer, muncul kekhawatiran soal perlindungan data pribadi pengguna.

Salah satu wujud nyata dari fenomena ini adalah munculnya platform media sosial berbasis video singkat, TikTok, yang kini menjadi salah satu aplikasi paling populer secara global. TikTok, yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi asal Tiongkok, ByteDance, memungkinkan pengguna untuk membuat, mengedit, dan membagikan video berdurasi pendek dengan berbagai fitur suara, efek visual, dan algoritma rekomendasi berbasis kecerdasan buatan. Aplikasi ini memiliki daya tarik yang tinggi, terutama di kalangan generasi muda, dan telah mencatatkan lebih dari satu miliar pengguna aktif bulanan secara global, termasuk jutaan pengguna di Indonesia.

Di Indonesia, perlindungan data pribadi masih menjadi isu yang berkembang. Regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan aturan turunannya belum secara rinci mengatur mekanisme pengumpulan, penyimpanan, dan transfer data oleh platform digital.

Penting untuk menilai sejauh mana TikTok menerapkan prinsip perlindungan data seperti hak pengguna, kontrol, transparansi, dan pengungkapan data. Analisis ini bertujuan memberikan gambaran kritis dan rekomendasi guna memperkuat perlindungan data pribadi di Indonesia.

## **B. Metode Analisis Implementasi Prinsip GDPR pada Aplikasi Tiktok**

### **Analisis Komparatif Regulatif**

- Membandingkan prinsip GDPR (Uni Eropa) dengan UU ITE dan UU PDP (Indonesia).
- Menilai sejauh mana kebijakan privasi TikTok sesuai atau menyimpang dari standar internasional dan nasional.
- Mengidentifikasi kesenjangan regulasi dan potensi risiko terhadap hak pengguna.

### **Content Analysis Kebijakan Privasi TikTok**

- Menganalisis struktur dan isi kebijakan: hak pengguna, pengumpulan data, transfer data internasional, dan keterlibatan pihak ketiga.
- Menilai kejelasan bahasa agar mudah dipahami pengguna awam.
- Mengevaluasi kesesuaian dengan GDPR, seperti keberadaan DPO, hak untuk dilupakan, dan mekanisme keberatan.

### **Case-based Evaluation (Evaluasi Kasus Nyata)**

- Mengkaji kasus pelanggaran, seperti denda dari otoritas Irlandia dan keluhan dari NOYB terkait pelanggaran GDPR.
- Menganalisis respons TikTok terhadap regulasi, seperti pengaturan default akun remaja dan revisi kebijakan privasi di Eropa.
- Menyajikan dinamika antara kebijakan internal TikTok dan tekanan regulasi global.

### C. Hasil dan Pembahasan / Analisis

#### 1. Hak Individu

##### - Prinsip GDPR

Pengguna memiliki hak untuk mengakses, memperbaiki, menghapus, dan membatasi pemrosesan data pribadi mereka.

##### - Praktik TikTok

TikTok menyediakan mekanisme bagi pengguna untuk mengakses dan mengelola data pribadi mereka melalui pengaturan akun. Pengguna dapat mengajukan permintaan terkait data mereka melalui formulir yang disediakan di situs resmi TikTok.

##### - Evaluasi

TikTok telah mengimplementasikan hak-hak individu sesuai dengan GDPR, namun efektivitas dan kemudahan akses bagi pengguna perlu terus dievaluasi untuk memastikan kepatuhan penuh.

Prinsip GDPR	Deskripsi Prinsip	Praktik Nyata di TikTok	Komentar/Kesesuaian
Hak Akses	Pengguna dapat meminta akses terhadap data mereka	Tersedia melalui pengaturan akun dan permintaan data	Cukup sesuai, perlu peningkatan kemudahan
Hak Perbaikan	Pengguna dapat memperbaiki data yang tidak akurat	Pengguna dapat ubah data profil kapan saja	Sesuai
Hak Penghapusan	Pengguna dapat menghapus data mereka	Penghapusan akun tersedia dengan tenggang waktu	Sesuai

Hak Pembatasan	Pengguna dapat membatasi pemrosesan data mereka	Tidak disebut eksplisit, tapi dapat menonaktifkan akun	Sebagian sesuai
----------------	---	--	-----------------

Tabel 1. Analisis Hak Individu berdasarkan GDPR pada TikTok

Penjelasan tabel

- **Hak Akses:** Fitur tersedia, tetapi prosesnya kurang praktis dan sulit dipahami oleh sebagian pengguna.
- **Hak Perbaikan:** Pengguna dapat memperbarui data dengan mudah, sesuai prinsip GDPR, dan sudah diimplementasikan dengan baik.
- **Hak Penghapusan:** Tersedia opsi hapus akun permanen, namun transparansi soal jenis data yang dihapus masih kurang meski prosedurnya sudah sesuai.

## 2. Pengendalian Informasi

### - Prinsip GDPR

Pengguna harus diberi kontrol atas data pribadi mereka, termasuk pengaturan privasi dan persetujuan eksplisit untuk pemrosesan data tertentu.

### - Praktik TikTok

TikTok memungkinkan pengguna untuk mengatur privasi akun mereka, seperti memilih antara akun publik atau pribadi, serta mengelola siapa yang dapat melihat konten mereka.

### - Evaluasi

Meskipun TikTok menyediakan pengaturan privasi, perlu ditinjau apakah pengaturan default dan proses persetujuan sudah sesuai dengan prinsip transparansi dan kontrol pengguna yang diharapkan oleh GDPR.

Prinsip GDPR	Deskripsi	Praktik TikTok	Komentar
Kontrol Pengguna	Pengguna memiliki kontrol atas data mereka	TikTok sediakan pengaturan privasi dan visibilitas konten	Sesuai
Persetujuan	Pemrosesan memerlukan persetujuan eksplisit	TikTok minta izin akses saat instalasi & penggunaan	Sesuai

Default Settings	Pengaturan awal harus pro-privasi	TikTok default ke akun publik	Perlu ditingkatkan
------------------	-----------------------------------	-------------------------------	--------------------

Tabel 2. Evaluasi Pengendalian Informasi oleh TikTok sesuai Prinsip GDPR

#### Penjelasan Tabel

Tabel ini menggambarkan sejauh mana TikTok menerapkan prinsip kontrol informasi terhadap data pengguna. Dalam hal kontrol pengguna, TikTok menyediakan fitur pengaturan privasi dan pengelolaan visibilitas konten, sehingga dinilai sesuai dengan prinsip dasar perlindungan data. Untuk aspek persetujuan, TikTok meminta izin akses data secara eksplisit saat instalasi dan penggunaan aplikasi, yang juga dianggap sesuai. Namun, pada aspek pengaturan awal atau default settings, TikTok secara otomatis mengatur akun pengguna menjadi publik, yang dinilai kurang berpihak pada privasi. Oleh karena itu, meskipun secara umum TikTok telah menerapkan kontrol pengguna dan mekanisme persetujuan dengan baik, pengaturan default masih perlu ditingkatkan agar lebih ramah privasi.

### 3. Prinsip Pengumpulan, Penggunaan, dan Penyimpanan

#### - Prinsip GDPR

Data harus dikumpulkan untuk tujuan yang spesifik, sah, dan terbatas, serta disimpan tidak lebih lama dari yang diperlukan.

#### - Praktik TikTok

TikTok mengumpulkan berbagai jenis data, termasuk informasi profil, konten pengguna, dan data teknis. Data disimpan selama diperlukan untuk menyediakan layanan dan memenuhi kewajiban hukum. [TikTok](#)

#### - Evaluasi

TikTok perlu memastikan bahwa pengumpulan dan penyimpanan data dilakukan sesuai dengan prinsip minimalisasi data dan batasan waktu penyimpanan yang ditetapkan oleh GDPR.

Prinsip GDPR	Deskripsi	Praktik TikTok	Komentar
Purpose Limitation	Data hanya dipakai untuk tujuan sah	Digunakan untuk konten & iklan	Tujuan kadang luas

Data Minimization	Hanya data yang relevan dikumpulkan	Kumpulkan banyak data (lokasi, perangkat, wajah)	Kurang sesuai
Storage Limitation	Data tidak disimpan terlalu lama	Tidak jelas batas waktu penyimpanan	Sebagian sesuai
Accuracy	Data harus akurat dan mutakhir	Pengguna dapat ubah data profil	Sesuai

Tabel 3. Kesesuaian TikTok terhadap Prinsip Pengumpulan, Penggunaan, dan Penyimpanan Data

#### Penjelasan Tabel

Tabel ini menunjukkan analisis penerapan prinsip pengumpulan, penggunaan, dan penyimpanan data oleh TikTok. Dalam aspek purpose limitation, meskipun data digunakan untuk keperluan konten dan iklan, tujuan penggunaannya masih terkesan luas dan kurang spesifik. Untuk data minimization, TikTok mengumpulkan berbagai data seperti lokasi, perangkat, hingga data biometrik, yang menunjukkan ketidaksesuaian dengan prinsip pengumpulan data yang relevan dan terbatas. Pada storage limitation, TikTok tidak secara jelas menginformasikan batas waktu penyimpanan data, sehingga dinilai hanya sebagian sesuai. Sementara dalam hal accuracy, pengguna diberi kebebasan untuk memperbarui data profil mereka, sehingga praktik ini dianggap sesuai dengan prinsip menjaga akurasi dan kebaruan data.

#### 4. Transfer dan Pengungkapan kepada Pihak Ketiga

##### - Prinsip GDPR

Transfer data ke luar negeri hanya diperbolehkan jika negara penerima memiliki tingkat perlindungan data pribadi yang memadai sesuai standar hukum yang berlaku. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini mengacu pada pentingnya menjaga kedaulatan data dan mencegah penyalahgunaan data oleh pihak asing.

##### - Praktik TikTok

TikTok mengakui bahwa data pengguna, termasuk yang berasal dari Indonesia, dapat diakses oleh staf dari negara lain seperti Tiongkok. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai potensi pelanggaran privasi dan kontrol atas data pribadi warga Indonesia.

##### - Evaluasi

Praktik ini berpotensi menimbulkan risiko pelanggaran terhadap prinsip perlindungan

data lintas negara. Belum adanya aturan tegas di Indonesia terkait transfer data internasional memperburuk situasi, dan TikTok perlu meningkatkan transparansi serta kontrol terhadap transfer data tersebut.

Prinsip GDPR	Deskripsi	Praktik TikTok	Komentar
Transfer ke Luar Negeri	Hanya jika negara tujuan memiliki perlindungan data memadai	Data pengguna Indonesia dapat diakses oleh staf luar negeri (mis. Tiongkok)	Tidak sesuai, berisiko melanggar kedaulatan data
Tujuan Transfer	Harus jelas dan sah secara hukum	Disebut secara umum dalam kebijakan privasi	Kurang transparan, perlu kejelasan lebih rinci
Transparansi	Harus mencantumkan siapa saja pihak ketiga penerima data	Tidak eksplisit menjelaskan penerima data secara detail	Tidak transparan, menimbulkan potensi pelanggaran kepercayaan

Tabel 4. Analisis Transfer dan Pengungkapan Data ke Pihak Ketiga oleh TikTok

#### Penjelasan

Tabel ini menjelaskan evaluasi terhadap praktik transfer dan pengungkapan data pengguna oleh TikTok dalam konteks perlindungan data di Indonesia. Pada aspek transfer ke luar negeri, TikTok memungkinkan data pengguna diakses oleh pihak luar negeri seperti Tiongkok, yang dinilai tidak sesuai karena berisiko melanggar prinsip kedaulatan data. Untuk tujuan transfer, meskipun disebutkan secara umum dalam kebijakan privasi, informasi tersebut kurang jelas dan tidak menjelaskan tujuan secara rinci, sehingga dianggap kurang transparan. Sementara itu, pada aspek transparansi, TikTok tidak secara eksplisit menyebutkan siapa saja pihak ketiga yang menerima data, sehingga menimbulkan potensi pelanggaran kepercayaan pengguna terhadap keamanan data pribadi mereka.

### 5. Pengelolaan dan Administrasi Kebijakan Privasi

- **Prinsip GDPR**  
Organisasi harus memiliki kebijakan privasi yang jelas, transparan, dan mudah diakses, serta menunjuk petugas perlindungan data (DPO) jika diperlukan.
- **Praktik TikTok**  
TikTok menyediakan kebijakan privasi yang komprehensif di situs webnya, namun tidak secara eksplisit menyebutkan penunjukan DPO. [TikTok](#)
- **Evaluasi**  
TikTok perlu memastikan bahwa struktur pengelolaan kebijakan privasi mereka memenuhi persyaratan GDPR, termasuk penunjukan DPO jika diwajibkan.

Aspek	GDPR	UU ITE
Hak Individu	Hak akses, koreksi, penghapusan, dan pembatasan pemrosesan data	Hak atas data pribadi diakui, namun implementasi masih berkembang
Pengendalian Informasi	Persetujuan eksplisit dan kontrol pengguna atas data mereka	Persetujuan diperlukan, namun mekanisme kontrol pengguna belum kuat
Pengumpulan dan Penyimpanan	Prinsip minimalisasi dan batasan waktu penyimpanan data	Tidak ada ketentuan spesifik mengenai batasan waktu penyimpanan data
Transfer Data Internasional	Diperbolehkan hanya ke negara dengan perlindungan data memadai	Tidak ada ketentuan khusus mengenai transfer data lintas negara
Pengelolaan Kebijakan Privasi	Diperlukan kebijakan privasi yang jelas dan penunjukan DPO	Tidak ada kewajiban khusus mengenai kebijakan privasi atau penunjukan DPO

**Tabel 5. Perbandingan Regulasi GDPR dan UU ITE terkait Perlindungan Data Pribadi**

#### Penjelasan Tabel

Tabel di atas membandingkan beberapa aspek penting antara GDPR dan UU ITE terkait pengelolaan data pribadi. Dalam hal hak individu, GDPR memberikan hak yang lebih jelas dan eksplisit, seperti hak akses, koreksi, penghapusan, dan pembatasan pemrosesan data, sementara di UU ITE, hak atas data pribadi diakui tetapi implementasinya masih berkembang. Mengenai pengendalian informasi, GDPR mewajibkan persetujuan eksplisit dan kontrol penuh pengguna atas data mereka, sedangkan UU ITE mengharuskan persetujuan namun mekanisme kontrol pengguna belum cukup kuat. Untuk pengumpulan dan penyimpanan data, GDPR menetapkan prinsip minimalisasi data dan batasan waktu penyimpanan, sementara UU ITE tidak memiliki ketentuan spesifik tentang waktu penyimpanan data. Transfer data internasional juga diatur dalam GDPR yang hanya



memperbolehkan transfer ke negara dengan perlindungan data yang memadai, sementara UU ITE tidak memiliki ketentuan khusus tentang transfer lintas negara. Terakhir, GDPR mengharuskan adanya kebijakan privasi yang jelas dan penunjukan Data Protection Officer (DPO), sedangkan UU ITE tidak menetapkan kewajiban terkait kebijakan privasi atau DPO.

## Temuan, Kritik, dan Rekomendasi

### Temuan

- TikTok telah mengambil langkah-langkah untuk mematuhi GDPR, namun masih terdapat kekurangan, terutama dalam hal transfer data internasional dan pengelolaan kebijakan privasi.
- Peraturan di Indonesia (UU ITE) masih kurang spesifik dalam mengatur perlindungan data pribadi, sehingga memberikan ruang bagi praktik yang kurang transparan.

### Kritik

- Kurangnya transparansi dalam transfer data ke negara dengan perlindungan data yang tidak memadai menimbulkan risiko terhadap privasi pengguna.
- Ketidaksesuaian antara praktik TikTok dengan prinsip-prinsip GDPR menunjukkan perlunya pengawasan yang lebih ketat.

### Rekomendasi

- TikTok perlu meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap GDPR, terutama dalam hal transfer data internasional dan penunjukan DPO.
- Indonesia perlu memperkuat regulasi perlindungan data pribadi, termasuk menetapkan batasan waktu penyimpanan data dan persyaratan untuk kebijakan privasi yang jelas.

Prinsip GDPR	Deskripsi Prinsip	Praktik Nyata di TikTok	Komentar/Kesesuaian
Hak Individu	Pengguna berhak akses, koreksi, penghapusan, dan pembatasan data	TikTok menyediakan fitur untuk mengakses dan menghapus data melalui pengaturan akun dan formulir permintaan resmi	Cukup sesuai, namun perlu ditingkatkan kemudahan akses dan kejelasan proses

<b>Pengendalian Informasi</b>	Pengguna memiliki kontrol atas data dan persetujuan	TikTok memungkinkan pengguna mengatur privasi akun dan mengontrol visibilitas konten	<b>Sesuai</b> , tapi pengaturan default perlu lebih berpihak pada privasi
<b>Data Minimization</b>	Hanya data yang diperlukan yang boleh dikumpulkan	TikTok mengumpulkan berbagai data termasuk lokasi, kontak, perangkat, dll	<b>Kurang sesuai</b> , ada indikasi pengumpulan data berlebihan
<b>Accuracy</b>	Data harus akurat dan dapat diperbarui	Pengguna dapat memperbarui informasi akun seperti nama, email, dan nomor telepon	<b>Sesuai</b> , menyebut DPO secara eksplisit
<b>Transfer Data</b>	Transfer hanya ke negara dengan perlindungan memadai	Data pengguna Eropa dapat diakses oleh tim di luar Eropa (termasuk China)	<b>Kurang sesuai</b> , beberapa transfer data lintas batas dipertanyakan oleh regulator
<b>Kebijakan Privasi</b>	Harus jelas, transparan, dan menunjuk DPO bila diperlukan	TikTok memiliki kebijakan privasi publik, namun tidak selalu	<b>Perlu perbaikan</b> , transparansi dan struktur tata kelola perlu ditingkatkan

#### Penjelsan Tabel

Tabel di atas menganalisis prinsip-prinsip GDPR dan penerapannya dalam praktik nyata di TikTok. Untuk hak individu, TikTok sudah menyediakan fitur untuk mengakses dan menghapus data, namun proses tersebut masih bisa diperbaiki agar lebih mudah diakses dan lebih jelas. Dalam hal pengendalian informasi, TikTok memungkinkan pengguna mengatur privasi akun dan mengontrol visibilitas konten, meskipun pengaturan default masih perlu disesuaikan agar lebih mendukung privasi pengguna. Mengenai data minimization, TikTok mengumpulkan data yang sangat banyak, termasuk lokasi, kontak, dan informasi perangkat, yang dapat dianggap berlebihan dan tidak sesuai dengan prinsip GDPR yang mengharuskan

pengumpulan data minimal. TikTok cukup sesuai dengan prinsip accuracy, karena memungkinkan pengguna untuk memperbarui informasi akun mereka seperti nama dan email. Namun, dalam hal transfer data, TikTok masih kurang sesuai dengan GDPR karena data pengguna Eropa dapat diakses oleh tim di luar Eropa, yang berisiko melanggar regulasi, terutama karena transfer data ke negara dengan perlindungan data yang memadai masih dipertanyakan. Terakhir, kebijakan privasi TikTok sudah memiliki kebijakan publik, namun transparansi dan struktur tata kelola kebijakan tersebut perlu ditingkatkan agar lebih sesuai dengan persyaratan GDPR.

# Referensi

ByteDance Ltd. (2023). *TikTok Privacy Policy*. Retrieved April 15, 2025, from <https://www.tiktok.com/legal/page/row/privacy-policy/id>

AP News. (2023, September 15). *EU fines TikTok \$368 million for failing to protect children's privacy*. Retrieved from <https://apnews.com/article/8ebacba7646ef872fb8e85a1bcb93876>

Reuters. (2025, January 16). *TikTok, 5 other Chinese firms hit by EU privacy complaints*. Retrieved from <https://www.reuters.com/technology/tiktok-5-other-chinese-firms-hit-by-eu-privacy-complaints-2025-01-16/>

Wired. (2023, November 12). *TikTok's new EU privacy policy still raises red flags*. Retrieved from <https://www.wired.com/story/tiktok-eu-privacy-policy-security-roundup>

Pemerintah Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id>

Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)*. Retrieved from <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/225200/uu-no-27-tahun-2022>